

**DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
MAN 1 PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2024**

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	(1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu perkara;	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	10 tahun atau sepanjang pegawai terperiksa dan/atau saksi memberikan persetujuan tertulis
		b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	(2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya perkara;		
		c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil			
2.	Dokumen proses dan hasil penjatuhan hukuman disiplin pegawai	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pegawai yang bersifat rahasia	10 tahun atau sepanjang pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin memberikan persetujuan tertulis
		b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun			

**DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
MAN 1 PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2024**

		2014 tentang Aparatur Sipil Negara			
		c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil			
3.	Konsep kebijakan/ pemikiran/ temuan/ laporan/ dokumen/ naskah/ surat/ penetapan yang dalam proses penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran HKI	a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	(1) Mengganggu kepentingan perlindungan HKI	Melindungi hak kekayaan intelektual	5 tahun atau sepanjang pemilik hak kekayaan intelektual memberikan persetujuan tertulis
		b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	(2) Melindungi data pribadi pemilik hak kekayaan intelektual		
		c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten	(3) Tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang		
		d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis			
		e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun			

**DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
MAN 1 PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2024**

		2020 tentang Cipta Kerja			
4.	Dokumen proposal penelitian dan pengabdian	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	Mengganggu kepentingan perlindungan HKI	Memberikan perlindungan terhadap HKI	7 tahun atau sepanjang pemilik proposal memberikan persetujuan tertulis
		b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi			
		c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja			
5.	Dokumen penilaian (review) proposal penelitian dan pengabdian	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN	5 tahun
		b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja			
6.	Konfigurasi data center, disaster recovery center,	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun	(1) Membahayakan keamanan Universitas Islam	Melindungi keamanan institusi	25 tahun

**DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
MAN 1 PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2024**

	database, aplikasi, software, username dan password	2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Negeri Walisongo Semarang		
		b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(2) Memicu penyalahgunaan data lembaga dan data pribadi		
7.	Informasi sistem keamanan, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari gangguan keamanan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(1) Membahayakan keamanan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Melindungi keamanan institusi	25 tahun
		b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(2) Memicu penyalahgunaan data lembaga dan data pribadi		
8.	Dokumen dan data hasil penilaian dalam proses pemilihan rektor, dekan dan pejabat di	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	4 tahun

**DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
MAN 1 PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2024**

	lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
9.	Usulan nama calon pejabat yang akan menduduki struktural yang pengisian jabatannya tidak melalui proses pemilihan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	4 tahun
		b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
10.	Data perencanaan mutasi tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan keresahan dan kolusi	Mencegah KKN	10 tahun
		b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
		c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			
11.	Informasi/ data identitas pribadi mitra kerjasama	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Mengganggu Pelaksanaan tugas dan fungsi kerjasama	(1) Melindungi isi akta otentik bersifat pribadi	10 tahun atau Persetujuan tertulis dari mitra kerjasama

**DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
MAN 1 PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2024**

		Keterbukaan Informasi Publik	UIN Walisongo Semarang		yang bersangkutan
		b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta		(2) Melindungi rahasia data pribadi	
12	Informasi/ data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/ peserta didik dan alumni	a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(1) Mengungkap isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan terakhir/ wasiat	Melindungi dokumen kerahasiaan	25 tahun atau Persetujuan rektor secara tertulis
		b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	(2) Mengungkap rahasia pribadi		
13.	Hasil evaluasi dan/atau rekomendasi terkait kinerja tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	10 tahun atau persetujuan rektor atau pimpinan unit kerja sesuai kewenangannya
		b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			

**DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
MAN 1 PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2024**

14.	Data rincian gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan/ atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	25 tahun atau persetujuan tertulis yang bersangkutan
		b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			
15.	Data hutang dan piutang tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan keresahan	Mencegah diskriminasi	25 tahun atau persetujuan tertulis yang bersangkutan
		b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			
16.	Dokumen seleksi calon mahasiswa baru (soal tes, jawaban tes, dan hasil tes)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme	Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik, bersih dan melayani	5 tahun
		b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			

**DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
MAN 1 PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2024**

		c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			
17.	Seluruh dokumen/ data/ informasi yang menurut sifatnya rahasia/ konfidensial	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	(1) Menimbulkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme	Mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan baik, bersih dan melayani	10 tahun atau persetujuan rektor secara tertulis
		b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	(2) Membahayakan keamanan institusi		
		c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara			